



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS

Debora Sanur Lindawaty
Peneliti Madya
debora.sanur@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Selasa 8 Februari 2022 telah terjadi insiden di Desa Wadas. Insiden terjadi saat proses pengukuran bakal lokasi Proyek Waduk Bener dan pertambangan batu andesit oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa Wadas adalah desa yang pemerintah pilih sebagai lokasi penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

Menurut Irjen Pol Achmad Luthfi, Kapolda Jawa Tengah, Kepolisian Daerah (Polda) menerjunkan personel atas permintaan BPN untuk mengamankan pengukuran. Personel ada 250 orang, untuk mendampingi 10 tim BPN yang mengukur 114 hektar lahan, 346 bidang. Hal ini untuk melindungi hak pemilik 346 bidang yang setuju diukur dan 36 bidang yang masih menolak.

Kasus Desa Wadas yang berlatar konflik agraria itu menuai beragam komentar dan disorot berbagai kalangan. Menurut Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) penolakan warga akibat pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan sarat manipulasi dan menabrak berbagai peraturan perundang-undangan, dan disertai kekerasan. Sementara itu, Arie Sujito, Pakar Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, pembangunan hanya sarana mencapai kesejahteraan rakyat hingga tidak seharusnya memakai cara-cara kekerasan atau penangkapan warga. Pandangan berikutnya menurut I Gusti Agung Made Wardana, pakar hukum lingkungan UGM, hukum Indonesia masih memiliki banyak masalah terkait perlindungan bagi warga yang ingin mempertahankan ruang hidupnya. Konflik di Wadas sebenarnya mengakar dalam cara pandang melihat tanah. Negara melihat tanah sebagai aset ekonomi dan selesai melalui ganti rugi, sedangkan warga melihat tanah lebih kompleks dan kaya.

Pada tanggal 13 Februari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga Desa Wadas dan meminta maaf. Pada pertemuan tersebut sejumlah warga menceritakan kronologi. Beberapa orang mengaku takut dan trauma akan peristiwa ricuh yang telah terjadi.

Tim Kantor Staf Presiden (KSP) juga mendatangi warga desa Wadas. Tim yang dikomandani Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko. Joko menegaskan, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari verifikasi lapangan KSP terkait insiden wadas. Mulai dari operasi aparat keamanan hingga aspek lingkungan. Selanjutnya KSP akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dengan masyarakat desa Wadas, agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan. Dalam pertemuan tersebut tim KSP juga menemui Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah.

Setelah pertemuan dengan warga dan KSP pada tanggal 14 Februari, Ganjar langsung menggelar rapat terkait proyek pembangunan Bendungan Bener, Purworejo. Dalam rapat tersebut Ganjar mengundang Kepala Kanwil BPN Jateng, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai

(BBWS) Serayu Opak, dan jajaran (Organisasi Perangkat Daerah) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Ia meminta agar para pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan tidak ada yang bermain-main terkait proyek Bendungan Bener.

Evaluasi difokuskan pada tiga hal, yakni evaluasi teknis terkait proyek pembangunan Bendungan Bener, evaluasi dalam cara pendekatan kepada masyarakat serta membuka lebar-lebar ruang dialog. Ganjar akan melakukan evaluasi teknis terkait isu lingkungan, isu penambangan dan melibatkan BBWS dan BPN sebagai institusi yang mengerjakan. Dalam hal ini Ganjar meminta BPN dan BBWS untuk lebih proaktif dalam penyelesaian masalah. Sejumlah hal teknis, seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang. Ganjar juga mengatakan, Pemprov Jateng sudah siap melakukan pendampingan pada warga Wadas yang trauma serta anak-anak jadi sasaran bullying melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu Ganjar menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi agar tidak boleh ada kekerasan.

Atensi DPR

Setelah insiden terjadi Komisi III DPR RI mengunjungi Desa Wadas akibat adanya kekerasan dari pihak Kepolisian terhadap warga. Namun, dalam temuan kunjungan tersebut permasalahan di Desa Wadas merupakan permasalahan Agraria yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu Komisi II DPR RI yang bermitra dengan KSP, BPN, dan Kemendagri perlu melakukan pengawasan dan progress evaluasi atas kasus tersebut.

Beberapa rekomendasi Komisi III yang perlu diawasi oleh Komisi II ialah: Pertama, Pemprov Jateng, Kantor Wilayah BPN, dan BBWS perlu melakukan pendekatan dialogis terhadap warga di lokasi Proyek Strategis Nasional dan sekitarnya. Kedua, Pemprov Jateng, BPN, BBWS harus melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener. Ketiga, Gubernur Jateng, BPN, dan BBWS perlu mengevaluasi kembali pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Keempat, BBWS harus merealisasikan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan masyarakat.

Sumber

jatengprov.go.id, 14 Februari 2022

liputan6.com, 11 dan 14 Februari 2022

merdeka.com, 13 Februari 2022

mongabay.co.id, 12 Februari 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://puslitbkd_official)



Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Nidya W. Sayekti
Venti Eka S.

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022